

# PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BLORA



## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, S.H  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Blora  
Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : DR. NOMMY HT. SIAHAAN, S.H.,M.H  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  
Selanjutnya disebut *pihak kedua*

**Pihak pertama** pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Blora, 23 Januari 2018**

**Pihak pertama**

**Pihak Kedua**

**AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, S.H**  
**NIP. 19620824 199212 1 001**

**DR. NOMMY HT. SIAHAAN, S.H.,M.H**  
**NIP. 19520126 198102 1 001**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2018
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100%
		Persentase penurunan sisa perkara	25%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	85%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
		Persentase Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%
5	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
6	Meningkatnya Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%
		Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	100%
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan	90%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.	Rp. 5.015.610.000,00
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.	Rp. 178.500.000,00
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Rp. <u>153.730.000,00</u>
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. <u>5.347.840.000,00</u></b>

( Lima milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

**Blora, 23 Januari 2018**

**Pihak pertama**

**Pihak Kedua**

**AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, S.H**  
**NIP. 19620824 199212 1 001**

**DR. NOMMY HT. SIAHAAN, S.H., M.H**  
**NIP. 19520126 198102 1 001**